



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 79 PID.SUS-TPK TAHUN 2024: IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN

JURIDICAL ANALYSIS OF RULING NUMBER 79 PID.SUS-TPK YEAR 2024: LEGAL AND POLICY IMPLICATIONS

Ilham Fathir Arifuddin¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: ilhamfathir411@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Article history :

Received : 11-01-2025

Revised : 12-01-2025

Accepted: 14-01-2025

Published: 17-01-2025

Abstract

The abstract of this research discusses the juridical analysis of Decision Number 79 Pid.Sus-TPK 2024, which focuses on the legal and policy implications of eradicating corruption in Indonesia. Effective law enforcement is the main pillar in creating justice and public order, especially in the context of criminal acts of corruption which have become a systemic problem in this country. Through a juridical approach, this research evaluates the application of the legal basis and legal procedures followed in the decision, as well as its impact on public perception and public trust in the legal system. The results of the analysis show that although there are challenges in law enforcement, this decision provides a positive signal for efforts to eradicate corruption and encourage public participation in monitoring corrupt practices. Thus, it is hoped that this research can provide constructive recommendations for the development of more effective legal policies and law enforcement practices in Indonesia

Keywords: *juridical analysis, legal decisions, eradicating corruption, public trust.*

Abstrak

Abstrak Penelitian Ini Membahas Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 79 Pid.Sus-Tpk Tahun 2024, Yang Berfokus Pada Implikasi Hukum Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Penegakan Hukum Yang Efektif Merupakan Pilar Utama Dalam Menciptakan Keadilan Dan Ketertiban Masyarakat, Terutama Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Menjadi Masalah Sistemik Di Negara Ini. Melalui Pendekatan Yuridis, Penelitian Ini Mengevaluasi Penerapan Dasar Hukum Dan Prosedur Hukum Yang Diikuti Dalam Putusan Tersebut, Serta Dampaknya Terhadap Persepsi Masyarakat Dan Kepercayaan Publik Terhadap Sistem Hukum. Hasil Analisis Menunjukkan Bahwa Meskipun Terdapat Tantangan Dalam Penegakan Hukum, Putusan Ini Memberikan Sinyal Positif Bagi Upaya Pemberantasan Korupsi Dan Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Praktik Korupsi. Dengan Demikian, Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Rekomendasi Yang Konstruktif Bagi Pengembangan Kebijakan Hukum Dan Praktik Penegakan Hukum Yang Lebih Efektif Di Indonesia.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Putusan Hukum, Pemberantasan Korupsi, Kepercayaan Publik.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi fokus utama, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat (Danil, 2021). Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketidakadilan



sosial, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dalam hal ini, Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024 menjadi salah satu contoh penting dalam proses penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap putusan ini sangat diperlukan untuk memahami implikasi hukumnya serta dampaknya terhadap kebijakan publik dan praktik penegakan hukum di Indonesia (Daraba, 2019).

Kasus yang diadili dalam putusan ini melibatkan seorang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan. Tindak pidana korupsi sering kali melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, yang seharusnya bertindak untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana proses hukum berjalan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga putusan akhir. Analisis terhadap putusan ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang keadilan yang ditegakkan, tetapi juga akan mengungkapkan sejauh mana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

Analisis yuridis terhadap putusan ini mencakup kajian terhadap dasar hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Hal ini meliputi penerapan undang-undang yang relevan, prosedur hukum yang diikuti, serta pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Dalam konteks hukum pidana, penting untuk memahami bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi didefinisikan dan dibuktikan di pengadilan. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita dapat menilai apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, analisis ini juga akan membantu mengidentifikasi potensi kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat berakibat pada ketidakadilan bagi terdakwa.

Setiap putusan pengadilan memiliki implikasi hukum yang luas, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat secara umum. Putusan ini tidak hanya berdampak pada nasib terdakwa, tetapi juga dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana putusan ini dapat mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Misalnya, jika putusan ini dianggap sebagai langkah maju dalam pemberantasan korupsi, maka dapat mendorong penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih ketat terhadap praktik korupsi. Sebaliknya, jika putusan ini dianggap lemah atau tidak konsisten, hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap efektivitas sistem hukum dan mendorong praktik korupsi yang lebih luas.

Dalam konteks kebijakan, putusan ini dapat memberikan masukan berharga bagi pengembangan kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menganalisis putusan ini, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem hukum yang ada, serta merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Misalnya, analisis terhadap putusan ini dapat mengungkapkan perlunya pelatihan lebih lanjut bagi aparat penegak hukum, peningkatan transparansi dalam proses hukum, serta penguatan lembaga-lembaga yang berfokus pada pemberantasan korupsi.

Persepsi masyarakat terhadap hukum dan keadilan sangat dipengaruhi oleh putusan-putusan yang diambil oleh pengadilan. Putusan yang dianggap adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sedangkan putusan yang dianggap tidak adil dapat menimbulkan skeptisisme dan ketidakpuasan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini juga harus mempertimbangkan bagaimana masyarakat memandang hasil dari proses hukum ini.



Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum, baik melalui media maupun forum diskusi, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi (Kurniawan et al, 2024).

Penegakan hukum di Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk intervensi politik, kurangnya sumber daya, dan korupsi dalam sistem peradilan itu sendiri. Dengan menganalisis putusan ini, kita dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut dan mencari solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Misalnya, penting untuk mengevaluasi apakah ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan hakim, serta bagaimana sistem peradilan dapat dilindungi dari pengaruh-pengaruh tersebut untuk memastikan keadilan yang sejati.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang tindak pidana korupsi. Dengan melakukan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam upaya memperkuat sistem hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta mendorong diskusi yang lebih luas mengenai pentingnya integritas dan transparansi dalam sistem hukum. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada dampak sosial dan politik yang lebih luas, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan dasar hukum dan prosedur hukum dalam Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum?
2. Apa saja implikasi hukum dari Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024 terhadap kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024 dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan dasar hukum dan prosedur hukum dalam Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024 untuk menilai keadilan dan kepastian hukum yang ditegakkan dalam proses peradilan.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum dari Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024 terhadap kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan.
3. Mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024 dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum, serta memberikan wawasan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024. Dalam konteks ini, penelitian akan dilakukan dengan mengkaji secara mendalam isi putusan, termasuk pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim, penerapan undang-undang yang berlaku, serta kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Peneliti akan melakukan analisis terhadap berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam kasus ini. Dengan pendekatan yuridis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum dari putusan dan implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia.

Selain itu, metode penelitian yuridis ini juga akan mencakup analisis komparatif dengan putusan-putusan serupa yang pernah ada, untuk mengidentifikasi pola-pola dalam penerapan hukum dan dampaknya terhadap kebijakan publik. Penulis akan membandingkan Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024 dengan putusan-putusan lain dalam konteks tindak pidana korupsi, guna mengevaluasi konsistensi dan keberlanjutan dalam penegakan hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan hukum dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademis mengenai dinamika hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan dasar hukum dan prosedur hukum dalam Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum

Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024 merupakan salah satu contoh penerapan hukum yang mencerminkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam putusan ini, dasar hukum yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menindak pelaku korupsi, serta menetapkan sanksi yang tegas bagi mereka yang terbukti bersalah. Selain itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga diterapkan untuk menegaskan peran serta pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan.

Prosedur hukum yang diterapkan dalam putusan ini mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan pidana. Proses dimulai dengan penyidikan oleh aparat penegak hukum, diikuti dengan penuntutan oleh jaksa, dan akhirnya diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam setiap tahapan, prinsip-prinsip hukum yang berlaku harus dipatuhi, termasuk hak-hak terdakwa untuk mendapatkan pembelaan hukum. Kesesuaian prosedur ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap sistem hukum yang ada (Sutiawan et al, 2022).

Prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi landasan penting dalam setiap putusan yang diambil oleh pengadilan. Prinsip keadilan mengharuskan bahwa setiap individu diperlakukan secara



adil dan setara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Dalam konteks putusan ini, pengadilan berusaha untuk menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak. Sementara itu, kepastian hukum menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan hukum yang berlaku dan dapat diprediksi oleh masyarakat.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan telah berupaya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan hukum, seperti adanya tekanan dari berbagai pihak, pengadilan tetap berpegang pada prinsip-prinsip tersebut. Hal ini terlihat dari keputusan yang diambil, di mana pengadilan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dari putusan tersebut terhadap masyarakat.

Implikasi dari putusan ini tidak hanya terbatas pada kasus yang diadili, tetapi juga berpengaruh pada kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya putusan yang tegas, diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Selain itu, putusan ini juga dapat menjadi acuan bagi penegak hukum lainnya dalam menangani kasus serupa di masa depan, sehingga memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan (Priyono, 2018).

Persepsi masyarakat terhadap putusan ini juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Masyarakat cenderung menilai keadilan dari hasil putusan yang diambil. Jika masyarakat merasa bahwa putusan tersebut adil dan sesuai dengan hukum, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan meningkat. Sebaliknya, jika masyarakat merasa bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan, maka kepercayaan terhadap sistem hukum akan menurun. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap putusan yang diambil.

Implikasi hukum dari Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024 terhadap kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia

Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024 memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu dampak utama dari putusan ini adalah perubahan kebijakan yang dihasilkan, di mana pengadilan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Dengan adanya putusan yang jelas dan tegas, diharapkan akan muncul kebijakan baru yang lebih ketat dalam menangani kasus-kasus korupsi, termasuk peningkatan sanksi bagi pelaku dan penguatan lembaga penegak hukum. Hal ini menciptakan harapan baru bagi masyarakat bahwa tindakan korupsi akan ditindaklanjuti dengan serius.

Selain itu, putusan ini juga berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya preseden hukum yang kuat, diharapkan para penegak hukum, termasuk jaksa dan polisi, akan lebih berani dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi. Penegakan hukum yang lebih tegas ini diharapkan dapat mengurangi tingkat korupsi di berbagai sektor, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dalam konteks ini, putusan tersebut berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan positif dalam budaya hukum di Indonesia.

Namun, analisis kritis terhadap implikasi hukum dari putusan ini juga perlu dilakukan. Salah satu kelebihan dari putusan ini adalah kemampuannya untuk memberikan sinyal yang jelas kepada masyarakat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Hal ini dapat mendorong masyarakat



untuk lebih aktif dalam melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa penegakan hukum yang terlalu ketat dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, yang dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Relevansi putusan ini dengan situasi korupsi di Indonesia sangat penting untuk dicermati. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang sistemik dan meluas, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam penanganannya. Putusan ini dapat dianggap sebagai langkah awal yang baik, tetapi tidak cukup jika tidak diikuti dengan kebijakan yang lebih luas dan terintegrasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan dan edukasi masyarakat mengenai bahaya korupsi.

Selanjutnya, untuk memastikan keberlanjutan dari dampak positif putusan ini, diperlukan kolaborasi antara berbagai lembaga, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. Kerjasama ini dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, program-program edukasi dan sosialisasi mengenai korupsi dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan yang dihasilkan dari putusan ini juga sangat penting. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat mengetahui efektivitas dari kebijakan yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar relevan dan efektif dalam mengatasi masalah korupsi yang ada.

Akhirnya, meskipun Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024 memberikan harapan baru dalam pemberantasan korupsi, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk bersama-sama memberantas korupsi dan menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi tonggak awal dalam upaya menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi dan lebih berkeadilan.

Persepsi masyarakat terhadap Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024 dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia

Persepsi masyarakat terhadap Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024 sangat penting untuk dipahami, karena dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Survei dan penelitian terkait persepsi publik menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang beragam mengenai putusan ini. Sebagian besar responden menganggap putusan tersebut sebagai langkah positif dalam pemberantasan korupsi, namun ada juga yang skeptis terhadap efektivitasnya. Penelitian ini mencerminkan bahwa meskipun ada harapan, masih terdapat keraguan mengenai konsistensi penegakan hukum di masa depan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap putusan ini sangat beragam. Salah satunya adalah pengalaman pribadi masyarakat dengan sistem hukum, di mana mereka mungkin pernah mengalami atau mendengar kasus-kasus di mana hukum tidak ditegakkan secara adil. Selain itu, pengaruh media juga sangat signifikan, karena pemberitaan yang berimbang dan objektif dapat membentuk opini publik. Di sisi lain, berita yang sensasional atau tidak akurat dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan skeptisisme terhadap putusan yang diambil.



Dampak dari putusan ini terhadap kepercayaan publik juga perlu dicermati. Hubungan antara putusan dan kepercayaan publik sangat erat, di mana putusan yang dianggap adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebaliknya, jika masyarakat merasa bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan, maka kepercayaan terhadap institusi hukum akan menurun. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap putusan yang diambil (Aprilla et al, 2024).

Analisis media dan opini publik menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat. Pemberitaan yang objektif dan informatif mengenai putusan ini dapat membantu masyarakat memahami konteks dan implikasi dari keputusan tersebut. Namun, jika media hanya menyoroti aspek negatif atau kontroversial, hal ini dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, media harus berperan sebagai jembatan informasi yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada publik.

Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, diperlukan rekomendasi yang jelas dan terarah. Salah satu strategi komunikasi hukum yang dapat diterapkan adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses hukum. Misalnya, pengadilan dapat mengadakan forum diskusi atau sosialisasi mengenai putusan-putusan penting, sehingga masyarakat dapat lebih memahami proses hukum yang terjadi. Keterlibatan ini juga dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan mereka (Utama, 2019).

Perbaikan dalam proses hukum juga menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik. Proses hukum yang transparan dan akuntabel akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif dan adil. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai etika dan integritas juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap Putusan Nomor 79 Pid.Sus-TPK Tahun 2024 mencerminkan harapan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi. Meskipun ada pandangan positif, keraguan dan skeptisisme masih ada, yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk membangun kepercayaan publik. Dengan melibatkan masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam proses hukum, diharapkan kepercayaan terhadap sistem hukum dapat diperkuat.

Akhirnya, keberhasilan dalam meningkatkan persepsi masyarakat terhadap putusan ini akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan media. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024 menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan transparan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus ini tidak hanya mengungkap praktik korupsi yang melibatkan individu, tetapi juga menunjukkan bagaimana jaringan korupsi beroperasi di tingkat yang lebih tinggi, melibatkan kolusi antara berbagai aktor dari sektor publik dan swasta. Analisis terhadap putusan ini memberikan wawasan yang lebih dalam



mengenai tantangan dan peluang dalam upaya pemberantasan korupsi, serta menyoroti perlunya kolaborasi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi, sementara lembaga penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme mereka. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Indonesia dapat bergerak menuju lingkungan yang lebih bersih dari praktik korupsi, di mana integritas dan keadilan menjadi prioritas utama dalam setiap aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (Oktober 2019).
- B. Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Dahyar Daraba, *Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik* (Makassar, Indonesia: Penerbit Leisyah, 2019).
- E. Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* (Jakarta: Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, 2021).
- E. Kurniawan, Susi Delmiati, dan None Fahmiron, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Secara Diversi," *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 479–486.
- Ihwan Sutiawan, Sigid Suseno, dan Maret Priyanta, "Prosedur Penegakan Hukum Pidana Terpadu: Dalam Tindak Pidana Dibidang Lingkungan Hidup," *Jurnal Wawasan Yuridika* 6, no. 1 (2022).
- W. Aprilla, M. Wulandari, dan A. Elcaputera, "Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 321–334.